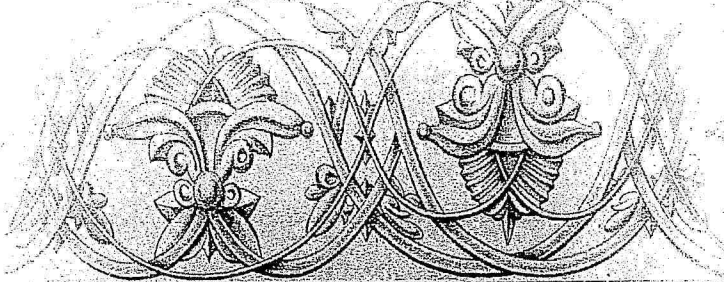


SEMINAR INTERNASIONAL KEBUDAYAAN

MINANGKABAU

DAN POTENSI ETNIK DALAM PARADIGMA MULTIKULTURAL



KEBUDAYAAN MINANGKABAU:
**POTENSI, PEWARISAN DAN PENGEMBANGANNYA DALAM
 PARADIGMA MULTIKULTURAL**

**PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 ANTARA PARASITISME DAN SIMBIOSIS MUTUALISME**

I Gde Pitana



SEMI-QUE V



BKSNT



PEMDA SUMBAR



UNAND

MEDIA INDONESIA

PROGRAM STUDI BAHASA, SASTRA DAN BUDAYA MINANGKABAU
 JURUSAN SASTRA DAERAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS ANDALAS
 23-24 AGUSTUS 2004

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN:

ANTARA PARASITISME DAN SIMBIOSIS MUTUALISME

IG Pitana

"Tourism is, everywhere, the enemy of authenticity and cultural identity" (Louis Turner and John Ash, 1976: 17)
"*the traditions of Bali will prosper in direct proportion to the success of tourist industry*" (Philip F. McKean 1973, dikutip dalam Wood 1979).

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi industri terbesar dewasa ini, dengan potensi perkembangan yang diprediksi akan semakin baik di masa-masa mendatang (WTO 2004). Jumlah wisatawan internasional meningkat dari sekitar 25 juta orang pada tahun 1950, menjadi 476 juta pada 1992, dan pada tahun 2000 angka ini mencapai 698,8 juta orang. Jumlah wisatawan internasional selalu mengalami peningkatan sampai penghujung

milennium, dengan peningkatan tertinggi terjadi tahun 2000 (9,7%). Meskipun memasuki milenium ketiga Dunia diguncang berbagai bencana, seperti tragedi WTC atau 9/11 tragedy di Amerika Serikat (11 September 2001), Tragedi Kuta (bom Bali, 12 Oktober 2002), merebaknya wabah SARS (Maret-Juni 2003), Perang Amerika-Irak (mulai April 2003), dan wabah flu burung (November 2003), tingkat penurunan jumlah kunjungan tidak terlalu besar, yaitu hanya -0,5% tahun 2001; kemudian naik 2,7% tahun 2002; dan turun lagi -1,2% tahun 2003; bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari segi absolut, jumlah wisatawan internasional masih cukup tinggi, yaitu mencapai 694 juta orang tahun 2003, dengan penerimaan 514,4 milyar dollar Amerika, atau menurun 2,2% dibandingkan tahun 2002 (WTO 2004). Untuk tahun 2004, WTO melihat adanya perkembangan positif, yang didukung oleh menguatnya indikator pertumbuhan ekonomi. Mengutip laporan International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi Dunia akan mencapai 4,6% tahun 2004 dan 4,4% tahun 2005, yang berada di atas angka pertumbuhan beberapa tahun terakhir (2,4% tahun 2001; 3,0% tahun 2002; dan 3,9% tahun 2003). Hal ini dikuatkan lagi dengan pulihnya ekonomi Amerika Serikat, Jepang dan Cina.

Jumlah penerimaan pariwisata tahun 1990 mencapai 268,2 M dollar AS, dan pada tahun 2000 mencapai angka 475,8 M dollar AS. Pada tahun 1995, pariwisata menyumbangkan 10,9% dari pendapatan (GDP) dunia. Pada tahun 2001, industri pariwisata menciptakan GDP sebesar 3,3 triliun dolar AS, hampir 11% dari total GDP dunia (UNEP 2002). Pada tahun 2005, pariwisata akan menghasilkan penerimaan mencapai 7,2 triliun dolar AS, atau 11,4% dari GDP dunia (WTTC 1995, dalam Wahab 1999). WTO memprediksi bahwa pariwisata akan terus mengalami perkembangan, dengan rerata pertumbuhan jumlah wisatawan internasional sekitar 4% per tahun sampai dengan tahun 2010. Sementara itu, wisatawan domestik diperkirakan mencapai jumlah sepuluh kali lipat dibandingkan wisatawan internasional, yang juga besar peranannya dalam pembangunan ekonomi daerah tujuan wisata.

Dari segi penyerapan tenaga kerja, WTO melukiskan bahwa satu dari delapan pekerja di dunia ini kehidupannya tergantung, langsung ataupun tidak langsung, dari pariwisata. Pada tahun 1995, pariwisata telah menciptakan kesempatan kerja secara langsung untuk 211 juta orang; dan pada tahun 2001, bagi 207 juta orang tenaga kerja, atau lebih dari 8% kesempatan kerja di seluruh dunia (UNEP 2002). Pada tahun 2005, diprakirakan pariwisata akan menciptakan lapangan kerja bagi 305 juta orang. Kalau mesin penggerak dalam penciptaan tenaga kerja pada Abad ke-19 adalah pertanian, dan pada abad ke-20 adalah industri manufacturing, maka pada Abad ke-21, mesin penggerak tersebut adalah pariwisata (Dawid J. de Villiers 1999; Salah Wahab 1999).¹

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. Dampak pariwisata terhadap masyarakat local merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam literature. Namun pembahasan lebih terfokus pada dampak terhadap masyarakat local, sedangkan dampak pariwisata terhadap wisatawan dan/atau negara asal wisatawan belum banyak mendapatkan pembahasan.

Dalam kaitannya dengan aspek sosial-budaya, di satu pihak ada hipotesis bahwa pariwisata merupakan 'musuh' dalam pelestarian budaya, tetapi di pihak lain ada juga posisi sebaliknya, bahwa pariwisata merupakan wahana yang sangat baik dalam pelestarian kebudayaan. Paper ini akan mencoba membahas hal ini dengan mengambil berbagai kajian dari berbagai destinasi wisata, dengan focus Bali sebagai salah satu contoh. Bali dijadikan contoh karena pariwisata sudah begitu dalam terintegrasi dalam kehidupan keseharian masyarakat Bali, dan Bali sudah menjadi 'icon' dalam kepariwisataan Indonesia.

¹ Diskusi teoretis tentang peranan pariwisata dalam pembangunan, dapat dilihat pada berbagai literature, seperti John Lea (1995); James Spillane (1994); Emanuel de Kadt (1979), dan Erawan (1993).

DAMPAK SOSIAL EKONOMI

Meskipun pariwisata menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, hukum, keamanan, dan sebagainya, dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata yang banyak mendapat ulasan adalah dampak terhadap sosial-ekonomi, dampak terhadap sosial budaya, dan dampak terhadap lingkungan

Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar (Cohen 1984), yaitu:

1. dampak terhadap penerimaan devisa
2. dampak terhadap pendapatan masyarakat
3. dampak terhadap kesempatan kerja
4. dampak terhadap harga-harga
5. dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
6. dampak terhadap kepemilikan dan kontrol
7. dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
8. dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Hampir semua literature dan kajian studi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak-dampak yang dinilai positif, yaitu dampak yang diharapkan, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. Pariwisata dipandang mampu menghasilkan angka pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi, melebihi angka pengganda pada berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun sulit melakukan penghitungan secara pasti terhadap angka pengganda ini, dari beberapa daerah/negara telah dilaporkan besarnya angka pengganda yang bervariasi. Di Irlandia, angka ini adalah 2,7; di Kepulauan Pasifik 3,2; di Yunani 1,2-1,4; sedangkan di Hawai hanya 0,9-1,3 (Pearce 1982).

Pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai negara, dan bagi beberapa negara/daerah, pariwisata telah menjadi penghasil devisa terbesar. Pada tahun 2002, 83% dari GDP bagi Anguila (di Kepulauan Karibea) berasal dari pengeluaran wisatawan; bagi St. Lucia (juga di Karibea), angka ini adalah 64%; sedangkan bagi Tonga (di Pasifik) pengeluaran wisatawan sudah mencapai 70% terhadap total devisa pada tahun 1990, dan angka ini mengalami trend peningkatan (Duval 2004; Fennel 1991). Angka-angka ini baru hanya dari pengeluaran wisatawan secara langsung, belum menghitung dampak tidak langsungnya melalui angka-angka pengganda.

Bagi Indonesia, peranan pariwisata juga sangat besar. Devisa yang diterima secara berturut-turut pada tahun 1996, 97, 98, 99, dan 2000 adalah sebesar 6,307.69; 5,321.46; 4,331.09; 4,710.22; dan 5,748.80 juta dollar AS (Santosa 2001).

Peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi bagi Bali, yang memang sudah terkenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata dunia, tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan tidak tersedianya sumberdaya alam seperti migas, hasil hutan, ataupun industri manufacturing yang berskala besar, maka pariwisata telah menjadi sector andalan dalam pembangunan. Kontribusi pariwisata menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Erawan (1999) menemukan bahwa pada tahun 1998, dampak pengeluaran wisatawan terhadap pendapatan masyarakat mencapai 45,3%, sedangkan dampak dari investasi di sektor pariwisata adalah 6,3%. Ini berarti bahwa secara keseluruhan, pariwisata menyumbang sebesar 51,6% terhadap pendapatan masyarakat Bali. Dilihat dari kesempatan kerja, pada tahun 1998 sebesar 38,0% dari seluruh kesempatan kerja yang ada di Bali dikontribusikan oleh pariwisata. Ini terjadi dari kesempatan kerja yang ditimbulkan oleh pengeluaran wisatawan sebesar 36,1%, dan akibat investasi di sektor pariwisata sebesar 1,9%. Angka 38% ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka tahun 1995 (yaitu sebesar 34,14%), dan nampaknya peningkatan akan terus terjadi dari tahun ke tahun. Erawan lebih lanjut mengatakan bahwa dampak pengeluaran wisatawan terhadap perekonomian Bali terdistribusikan ke berbagai sektor, bukan saja hotel dan restoran. Distribusi tersebut juga tersebar ke sektor pertanian (17,93%), sektor industri dan kerajinan

(22,73%), sektor pengangkutan dan komunikasi (12,62%), sektor jasa-jasa (12,59%), dan sebagainya. Hal ini sejalan pula dengan data mengenai distribusi pengeluaran wisatawan, yang menunjukkan bahwa selama di Bali, pengeluaran wisatawan yang terserap ke dalam 'perekonomian rakyat' cukup tinggi.

Antara dan Parining (1999) juga mengemukakan bahwa pariwisata mempunyai keterkaitan ekonomi yang sangat erat dengan banyak sektor, melalui apa yang disebut *open-loop effect* dan *induced-effect* (di samping istilah yang sudah umum dikenal sebagai *trickle-down effect* dan *multiplier effect*). Dengan menggunakan model SAM (*Social Accounting Matrix*), ditemukan bahwa pengaruh pengeluaran wisatawan sangat significant terhadap denyut nadi perekonomian Bali, yang meliputi belasan sektor.

Peranan pariwisata juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja, walaupun tidak ada angka pasti untuk 'sektor pariwisata' dalam catatan statistik. Tetapi, meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Bali secara jelas menggambarkan peranan sektor (yang terkait dengan) kepariwisataan. Sektor perdagangan, restoran dan perhotelan (pariwisata) semakin besar peranannya dalam kontribusinya terhadap PDRB. Kontribusi tersebut meningkat dari 9,52% pada 1969, menjadi 13,90% pada 1983. Pada tahun 2000, sektor tersebut menyumbang sebesar 33,19% dari PDRB Bali atas dasar harga berlaku.

Dari segi pendapatan pemerintah, PHR merupakan sumber PAD yang sangat besar peranannya dalam pembangunan Bali. Pada tahun 1999/2000, jumlah PHR yang dihasilkan seluruh kabupaten/kota di Bali mencapai 299,483 milyar rupiah, dan tahun 2001 angka ini mencapai 421,853 milyar rupiah (meskipun pariwisata sudah mengalami tragedi WTC).

Dari segi ketenagakerjaan, pada tahun 1995 pariwisata menyerap 34,14% dari seluruh tenaga kerja yang bekerja di Bali. Persentase ini terus naik, dan pada tahun 1998 mencapai 38,0%.

Di samping berbagai dampak yang dinilai positif, hampir semua penelitian juga menunjukkan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif), seperti semakin memburuknya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antar daerah, hilangnya kontrol masyarakat local terhadap sumberdaya ekonomi, munculnya neo-colonialisme atau neo-imperialisme, dan sebagainya. Banyak peneliti menyebutkan bahwa pariwisata telah menjadi wahana eksploitasi bagi negara-negara maju (negara asal wisatawan) terhadap negara-negara berkembang (daerah tujuan wisata). Berbagai fasilitas pariwisata yang ada di DTW, sebagian besar adalah fasilitas yang diimpor dari negara asal wisatawan. Sebuah lukisan secara karikaturis menggambarkan bahwa muatan lokal dari kegiatan pariwisata sangat kecil, karena segala kebutuhan wisatawan maupun aktivitas pendukungnya didatangkan dari berbagai negara maju. Berbagai fasilitas dimaksud antara lain: "mobil didatangkan dari Jerman, computer dari Jepang, printer dari Hongkong, lampu dari Inggris, whisky dari Scotlandia, vodka dari Rusia, makanan dari Perancis, tas dari Italy, karpet dari Irlandia, fire equipment dari USA, furniture dari Swedia, dst" (Fennel 1999: 164).

Akibat kecilnya muatan local, maka 'kebocoran ekonomi' (*economic leakage*) menjadi begitu besar, terutama pada resor-resor tertutup (*enclave resort*) yang didominasi modal asing. Kebocoran yang dialami oleh Kepulauan Cook mencapai 56%; di St Lucia mencapai 45%; Bahama 43%; dan Antigua 41%. Mengalirnya manfaat ekonomi dari negara berkembang ke negara maju ini mempunyai pola yang sama dengan berbagai MNC pada sektor lainnya, yang berkembang sejak industrialisasi dan modernisasi Dunia Ketiga. Brohman (1996: 55) sampai pada kesimpulan bahwa peranan pariwisata sebagai paspor untuk pembangunan harus dikaji ulang. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu munculnya kolonialisme baru melalui pariwisata. Negara-negara yang menjadikan pariwisata sebagai andalan akhirnya terjatuh dalam ketergantungan (*dependency*) yang begitu mencekik leher. Lebih jauh Brohman (1996: 66) menyatakan:

"... the Third World tourism industry will be threatened by many of the problems These problems include excessive foreign dependency contributing to a loss of local control over resources and substantial overseas leakage of tourism earnings; the lack of articulation

between tourism enclaves and domestic economic sectors, producing low multiplier and spread effects; the reinforcement of neo-colonial pattern of socioeconomic and spatial polarization; ... the unequal distribution of the costs and benefits of tourism and the perceived loss of cultural identity and social control to outsiders" (Brohman 1996: 66).

DAMPAK SOSIAL BUDAYA

Secara teoretis, antara dampak sosial dan dampak kebudayaan memang dapat dibedakan². Namun demikian, Mathieson dan Wall (1982:37) menyebutkan bahwa "*there is no clear distinction between social and cultural phenomena*", sehingga sebagian besar ahli menggabungkan dampak sosial dan dampak budaya di dalam pariwisata ke dalam judul 'dampak sosial-budaya' (*the sociocultural impact of tourism in a broad context*).

Menilai dampak sosial-budaya pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit, terutama dari segi metodologis. Salah satu kendala yang hampir tidak dapat diatasi adalah banyaknya faktor kontaminasi (*contaminating factors*) yang ikut berperan di dalam mempengaruhi perubahan yang terjadi, seperti pendidikan, media masa, transportasi, komunikasi, maupun sektor-sektor pembangunan lainnya menjadi wahana dalam perubahan sosial-budaya, serta dinamika internal masyarakat itu sendiri. Douglas dan Douglas (1996: 49) mengingatkan bahwa berbagai perubahan sosial-budaya yang terjadi tidak dapat sepenuhnya dipandang sebagai dampak pariwisata semata-mata. Hal ini adalah karena pariwisata terjalin erat dengan berbagai aktivitas lain, yang mungkin pengaruhnya lebih besar, atau sudah berpengaruh jauh sebelum pariwisata berkembang.

Di dalam melihat dampak sosial-budaya pariwisata terhadap masyarakat setempat, masyarakat tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang '*internally totally integrated entity*', melainkan harus juga dilihat segmen-segmen yang ada, atau melihat berbagai *interest groups*, karena dampak terhadap kelompok sosial yang satu belum tentu sama –bahkan bisa bertolak belakang– dengan dampak terhadap kelompok sosial yang lain. Demikian juga mengenai penilaian tentang positif dan negatif, sangat sulit untuk digeneralisasi untuk suatu masyarakat, karena penilaian positif atau negative tersebut sudah merupakan penilaian yang mengandung 'nilai' (*value judgement*), sedangkan nilai tersebut tidak selalu sama bagi segenap kelompok masyarakat. Artinya, dampak positif ataupun negative masih perlu dipertanyakan, "positif menurut siapa dan negative menurut siapa?" (Pitana 1999).

Terlepas dari berbagai kendala yang disebutkan di atas, berbagai kajian teoretis dan empiris yang dilakukan oleh sosiolog dan antropolog memang secara meyakinkan menemukan adanya berbagai dampak pariwisata terhadap masyarakat setempat –baik pariwisata secara individual ataupun bersama-sama dengan kegiatan lainnya.

Asumsi yang paling umum digunakan di dalam melihat 'dampak' sosial-budaya pariwisata terhadap masyarakat setempat menyiratkan bahwa pariwisata adalah 'faktor luar' yang 'menghantam' masyarakat, yang disebut sebagai model 'bola bilyard' (Wood 1984). Sebagaimana dikemukakan oleh Wood, dalam model 'bola-bilyard', objek yang bergerak (pariwisata) secara langsung menghantam objek yang diam (kebudayaan daerah), atau melalui objek perantara (broker kebudayaan). Dalam hal ini tersirat juga asumsi bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang diam, tidur, atau pasif, dan seolah-olah kebudayaan

² Secara teoretis, Pizam and Milman (1984) mengatakan bahwa dampak sosial budaya adalah "the ways in which tourism is contributing to changes in value systems, individual behaviour, family relationships, collective lifestyles, moral conduct, creative expressions, traditional ceremonies and community organization" (Pizam and Milman 1984:11). Dampak sosial menyangkut "the more immediate changes in the social structure of the community and adjustments to the destination's economy and industry" sedangkan "the cultural impacts focus on the longer-term changes in a society's norms and standards, which will gradually emerge in community's social relationships and artefacts" (Murphy 1985:117)"

tersebut adalah sesuatu yang homogen. Pendekatan seperti ini mengingkari dinamika masyarakat dimana pariwisata mulai masuk, dan tidak mampu melihat berbagai respon aktif dari masyarakat terhadap pariwisata.

Di dalam melihat pengaruh pariwisata terhadap masyarakat (dan kebudayaan) setempat, harus disadari bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang secara internal terdeferensiasi, aktif, dan selalu berubah. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih realistis adalah dengan menganggap bahwa pariwisata adalah 'pengaruh luar yang kemudian terintegrasi dengan masyarakat', dimana masyarakat mengalami proses menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebudayaannya, atau apa yang oleh Michel Picard (1993; 1996) disebut sebagai proses 'turistifikasi' (*touristification*). Di samping itu perlu juga diingat bahwa konsekuensi yang dibawa oleh pariwisata bukan saja terbatas pada hubungan langsung *host-guest*. Pengaruh di luar interaksi langsung ini justru lebih penting, karena mampu menyebabkan restrukturisasi pada berbagai bentuk hubungan di dalam masyarakat (Wood 1984).

Secara teoretis, Cohen (1984) mengelompokkan dampak sosud pariwisata ke dalam sepuluh kelompok besar, yaitu :

- (1) dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya;
- (2) dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat;
- (3) dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial;
- (4) dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
- (5) dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat;
- (6) dampak terhadap pola pembagian kerja;
- (7) dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial;
- (8) dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan;
- (9) dampak terhadap meningkatnya penyimpanan-penyimpanan sosial; dan
- (10) dampak terhadap bidang kesenian dan adat-istiadat.

Sedangkan Pizam and Milman (1984) mengklasifikasikan dampak sosial-budaya pariwisata atas enam, yaitu

1. dampak terhadap aspek demografis (jumlah penduduk, umur, perubahan piramida kependudukan),
2. dampak terhadap mata pencaharian (perubahan pekerjaan, distribusi pekerjaan),
3. dampak terhadap aspek budaya (tradisi, keagamaan, bahasa),
4. dampak terhadap transformasi norma (nilai, moral, peranan seks),
5. dampak terhadap modifikasi pola konsumsi (infrastruktur, komoditas), dan
6. dampak terhadap lingkungan (polusi, kemacetan lalu lintas).

Banyak kajian telah dilakukan terhadap dampak sosial-budaya pariwisata, dengan penekanan pada aspek-aspek yang berbeda, serta dengan perspektif teori yang berbeda pula.

Mathieson dan Wall (1982) menemukan bahwa pariwisata telah mengubah struktur internal dari masyarakat, sehingga terjadi perbedaan antara mereka yang mempunyai hubungan dengan pariwisata dan mereka yang tidak. Jadi, keterkaitan pariwisata menjadi salah satu pemisah atau pembeda dalam masyarakat. Krippendorf (1987) lebih lanjut melaporkan bahwa pariwisata mempunyai sifat kolonialistik, sehingga merebut independensi masyarakat local di dalam proses pengambilan keputusan. Burns and Holden (1995) juga menyebutkan bahwa pariwisata memberikan keuntungan sosial-ekonomi pada satu sisi, tetapi di sisi lain membawa ketergantungan dan ketimpangan sosial, atau memperparah ketimpangan yang telah ada.

Dari segi gender, Crompton dan Sanderson (1990) mengatakan bahwa sifat pekerjaan di dalam pariwisata semakin memperparah segregasi gender dalam masyarakat. Sebaliknya Urry (1991) menemukan bahwa pariwisata memberikan peluang kepada wanita untuk secara sosial-ekonomi lebih independent, sehingga perbedaan gender semakin menipis.

Sharpley (1994) melihat bahwa pariwisata merangsang munculnya komunikasi yang lebih intensif di dalam masyarakat lokal. Masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pariwisata, dan manfaat ekonomi pariwisata dapat digunakan dalam kegiatan pelestarian budaya, dan secara nyata pariwisata memberikan kontribusi nyata di dalam pelestarian bangunan-bangunan bersejarah atau keagamaan.

Sementara banyak yang khawatir dengan terjadinya proses kehilangan otentisitas dalam kebudayaan lokal, bagi Urry, kebudayaan memang selalu beradaptasi, termasuk dalam menghadapi pariwisata, dan di dalam proses tersebut tidak berarti makna atau otentisitas otomatis hilang. Akulturasi merupakan proses yang wajar dalam setiap pertemuan antar budaya. Namun demikian, ia juga mengakui adanya komoditisasi dari berbagai aspek keagamaan, yang memunculkan konflik, karena pengaruh pariwisata. Pendapat ini didukung oleh Burns and Holden (1995), yang melihat perubahan fungsi kebudayaan, karena kebudayaan dipandang sebagai sumberdaya komersial. Mengenai hal ini, Cohen (1988) melihat ada kesan terjadinya dampak negatif akibat adanya komoditisasi. Namun dilain pihak, De Kadt (1979) mengatakan bahwa kesenian, kerajinan, dan berbagai aspek kebudayaan lokal bisa mengalami revitalisasi akibat kedatangan pariwisata.

Pariwisata juga menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk, karena peluang kerja dan kehadiran tamu merangsang kaum muda untuk pindah ke lokasi di mana pariwisata berkembang. Secara akumulatif hal ini akan menyebabkan terjadinya *overcrowding*, yang dapat bermuara pada berbagai masalah sosial.

Sifat dan bentuk dari dampak sosial-budaya dipengaruhi oleh berbagai factor. Pitana (1999) menyebutkan bahwa factor-faktor yang ikut menentukan dampak sosial-budaya tersebut adalah sbb.

- (1) Jumlah wisatawan, baik absolut maupun relatif terhadap jumlah penduduk lokal;
- (2) Objek dominan yang menjadi sajian wisata (*the tourist gaze*) dan kebutuhan wisatawan terkait dengan sajian tersebut;
- (3) Sifat-sifat atraksi wisata yang disajikan, apakah alam, situs arkeologi, budaya kemasyarakatan, dst;
- (4) Struktur dan fungsi dari organisasi kepariwisataan di DTW;
- (5) Perbedaan tingkat ekonomi dan perbedaan kebudayaan antara wisatawan dengan masyarakat lokal;
- (6) Tingkat otonomi (baik politik, geografis, dan sumberdaya) dari DTW;
- (7) Laju/kecepatan pertumbuhan pariwisata;
- (8) Tingkat perkembangan pariwisata (apakah awal, atau sudah jenuh);
- (9) Tingkat pembangunan ekonomi DTW;
- (10) Struktur sosial masyarakat lokal;
- (11) Tipe resor yang dikembangkan (*open* ataupun *enclave resorts*);
- (12) Peranan pariwisata dalam ekonomi DTW.

PARIWISATA, PENGHANCUR ATAU PELESTARI KEBUDAYAAN? BALI SEBAGAI JENDELA³

Pariwisata sudah menjadi *bread and breath* bagi separuh lebih penduduk Bali. Untuk beberapa dasawarsa terakhir, pariwisata telah menjadi generator penggerak dalam pembangunan ekonomi, dan menjadi lokomotif dalam perubahan sosial-budaya.⁴ Internasionalisasi lewat pariwisata, khususnya pariwisata budaya seperti yang dikembangkan di Bali, membawa masyarakat lokal terjepit di antara dua kutub kekuatan. Di satu pihak, mereka diwajibkan memelihara tradisi dan adat budayanya, yang merupakan komoditas yang dapat 'dijual' dalam pariwisata. Di sisi lain, internasionalisasi melalui jaringan pariwisata berarti membenturkan kebudayaan lokal tersebut dengan dunia modern.

³ Bagian ini diambil dari pidato pengukuhan guru besar penulis, 15 Juni 2002, dengan sedikit revisi.

⁴ Ulasan mengenai hal ini, antara lain dapat dilihat pada tulisan Erawan (1993); Hassall dkk. (1992); Pitana (1992 dan 1999); Wood (1979); McTaggart (1980) dan Picard (1996).

Ini memberikan peluang besar bahwa budaya lokal akan hanyut dalam derasny gelombang budaya global (Williams 1995; Crick 1989; Francillon 1977; Picard 1996).

Karena intensifnya hubungan Bali dengan pariwisata, sekarang masyarakat Bali telah mengalami gejala touristifikasi. Melalui proses internasionalisasi ini, masyarakat Bali menjadi "*touristic society*". Proses internasionalisasi dan/atau touristifikasi mempunyai dampak yang sangat tinggi terhadap eksistensi kebudayaan lokal, yang mampu mentransformasikan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.

Banyak kalangan sangat khawatir dengan touristifikasi ini. Touristifikasi akan dapat mengubah inti kebudayaan Bali, pendangkalan terhadap kualitas kebudayaan, serta hilangnya bentuk-bentuk sosial yang telah terbukti mampu menopang integritas masyarakat Bali.⁵ Bahkan ada yang menyatakan bahwa sekarang ini jalinan sosial dan keagamaan Bali yang begitu kompleks, ketat dan rapi, telah tercerai berai di bawah pengaruh kepariwisataan. Unsur-unsur kebudayaan Bali berangsur-angsur menjadi cair, dan kemudian hanyut ke lautan budaya dunia yang semakin kuat, dalam lalu lintas kepariwisataan (Dalton 1990; Picard 1990; dan Naya Sujana 1989)

Banyak orang berpendapat bahwa kebudayaan Bali telah mengalami erosi, yang dapat dilihat dari munculnya efek penurunan (*demonstration effect*), tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kebudayaan sendiri; terjadinya komoditisasi terhadap kebudayaan; terjadinya penurunan kualitas hasil kesenian; profanisasi kesenian sakral, profanisasi kegiatan ritual ataupun tempat suci; dan bahkan ada yang mengatakan bahwa manusia Bali dewasa ini sudah semakin kecil kemauannya untuk mempertahankan identitas budayanya atau ke-Bali-annya.⁶

Sebaliknya, banyak juga ahli sosiologi dan antropologi yang melihat bahwa pariwisata (internasionalisasi) tidak merusak kebudayaan Bali, melainkan justru memperkuat, karena terjadinya proses yang disebut involusi kebudayaan (*cultural involution*). McKean (1978) mengatakan,

... meskipun perubahan sosial ekonomi sedang terjadi di Bali, ... semua itu terjadi secara bergandengan tangan dengan usaha konservasi kebudayaan tradisional.... Kepariwisataan pada kenyataannya telah memperkuat proses konservasi, reformasi, dan penciptaan kembali berbagai tradisi.⁷

Ahli lain berpendapat bahwa dampak kepariwisataan di Bali bersifat aditif, dan bukan substitutif. Artinya, dampak tersebut tidak menyebabkan transformasi secara struktural, melainkan terintegrasi dengan kehidupan tradisional masyarakat (Lansing 1974). Hal-hal luar diserap dan ditambahkan ke dalam kebudayaan, sebagai suatu proses pengayaan.

Penelitian lapangan di beberapa daerah pariwisata menunjukkan, organisasi sosial tradisional (khususnya *banjar* dan *desa pakraman*)⁸ bahkan bertambah kuat, bertambah

⁵ Lihat misalnya tulisan Ngurah Bagus (1989), khususnya halm. 106.

⁶ Uraian mengenai berbagai dampak negatif pariwisata Bali secara lebih detail dapat dilihat pada berbagai publikasi, seperti Picard (1990, 1996), Wood (1979), dan Pitana (1996 dan 1999).

⁷ Philip F. McKean (1973) menulis: *...the traditions of Bali will prosper in direct proportion to the success of tourist industry. Far from destroying, ruining, or 'spoiling' the culture of Bali... the advent of income of tourists is likely to fortify and foster the arts* (dikutip dalam Wood 1979).

⁸ *Desa pakraman* (dulu dikenal sebagai *desa adat*) adalah lembaga tradisional komunitas masyarakat Bali-Hindu yang terkait dengan penanganan masalah sosial-budaya masyarakat. *Desa pakraman* dicirikan oleh kepemilikan tiga pura utama (disebut *kahyangan tiga*), mempunyai batas-batas wilayah yang, mempunyai anggota yang pasti, dan mempunyai struktur kepemimpinan. *Desa pakraman* (khususnya yang mempunyai anggota banyak)

dinamis. Pariwisata telah menjadi wahana dinamisasi masyarakat (Pitana 1999, Gayatri 2003). Hal ini terkait erat dengan peningkatan ekonomi yang dibawa oleh kepariwisataan, serta semakin bertumbuh-kembangnya kesadaran akan 'identitas diri' (Pitana 1991, 1995). Penemuan ini menghidupkan kembali thesis Noronha (1979), bahwa industri pariwisata tidak mencabut keterikatan manusia Bali terhadap organisasi tradisional, di mana budaya Bali berakar, yaitu desa pakraman (banjar). Bahkan pariwisata dapat memperkuat desa pakraman, melalui aliran ekonomi yang dibawa oleh pariwisata, yang disalurkan kepada lembaga tradisional oleh pelaku pariwisata.

Dengan kehadiran pariwisata, masyarakat Bali secara dinamis dan kreatif telah mendialogkan antara proses internasionalisasi dan tradisionalisasi untuk melakukan 'metamorfosis'. Kalau dilihat dalam kurun waktu yang panjang, jelas manusia dan kebudayaan Bali sudah berubah, namun esensi Bali masih tetap kuat. Perubahan sosial-budaya yang terjadi melalui proses dialog antara kekuatan internasionalisasi dan tradisionalisasi ini menyebabkan manusia Bali seakan-akan melakukan 'konversi'. Namun konversi tersebut dilakukan tetap dalam agama Hindu dengan nuansa Bali yang kental, atau apa yang oleh Clifford Geertz (1973) disebut sebagai *internal conversion*.

Internasionalisasi dan globalisasi budaya selalu menimbulkan pertanyaan akan identitas budaya dan manusia lokal. Ada asumsi umum bahwa dalam proses internasionalisasi dan modernisasi, masyarakat lokal akan terjepit, termarginalisasi, dan kehilangan identitas budayanya (Lanfant 1995). Kenyataannya, meskipun budaya pariwisata telah menjadi budaya Bali, dan Bali telah mengalami proses '*touristification*,' identitas budaya masyarakat Bali masih tetap, kalau tidak boleh dikatakan menguat. Temuan-temuan lapangan juga menunjukkan bahwa kebudayaan Bali sampai saat ini masih sangat kuat melekat pada identitas orang Bali, dan kekhawatiran bahwa simpul-simpul budaya telah tercair-berai tidaklah benar. Data lapangan seperti ini telah banyak mengubah pandangan orang yang semula pesimistis terhadap kelestarian kebudayaan Bali.⁹ Meskipun telah lama terjadi kontak yang intensif dengan pariwisata, identitas ke-Bali-an ternyata menguat dengan semakin deras arus internasionalisasi.¹⁰

Pembangunan pariwisata telah menyebabkan adanya proses '*destructuring and restructuring*' dari media identitas etnis, yang pada akhirnya justru memperkuat identitas. Hal ini senada dengan temuan Lanfant (1995), yang melaporkan bahwa:

umumnya dibagi ke dalam kelompok-kelompok teritorial yang lebih kecil, yang disebut dengan *banjar*. Saat ini (2004) di Bali ada 1401 *desa pakraman* dengan sekitar 4.100 banjar.

⁹ Naya Sujana, yang pada 1989 sangat khawatir dengan kebalian orang Bali, pada 1994 menyimpulkan hal yang sebaliknya: "Dalam proses transformasi budaya sekarang ini, apakah manusia Bali transisi akan mengguncangkan akar-akar budaya, adat, dan agamanya? Jawabnya: "tidak." Memang, ada guncangan-guncangan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan keamanan; namun guncangan-guncangan tersebut tidak sampai membahayakan poros-poros budaya, adat, dan agama. Struktur sosial masyarakat Bali memiliki ketahanan yang cukup dinamis dan cukup berarti, sehingga masih memiliki daya lentur yang baik dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan.... [K]risis sosial dan budaya masih tetap dapat diendalikannya oleh masyarakat Bali, untuk kembali ke posisi keseimbangan...." (1994: 69).

¹⁰ Dalam kaitan ini, identitas yang dimaksud bukanlah 'identitas' yang digambarkan oleh para 'romantists' atau 'primordialists' (Eickelman and Piscatory 1990), yang mendefinisikan identitas sebagai sesuatu yang 'fixed': "*Bali must look like Bali*" atau "*may Bali stay true to herself*." Sebaliknya, identitas dalam hal ini didefinisikan sebagai sesuatu yang 'fluid' yang terbuka terhadap proses *reflexivity*, *reevaluation*, *reinterpretation*, atau *reconstruction*. Secara singkat, mengikuti Lanfant et al. (1990: x), "*identity is always in formulation, a constant site of struggle for those involved*." Secara ringkas, "*cultural identity is a product of active construction ..*" (Jonathan Friedman 1993: 765).

... societies have now discovered in the international tourism a means of survival and even advancement. Tradition has been re-evaluated, integrated into the mechanisms of economic production and incorporated into the cultural systems of modern society (Lanfant 1995:37).

Manusia Bali tentu tidak mau 'dikonservasi,' dalam arti yang statis, menjadi a 'timeless society.' Orang Bali melestarikan budayanya tidaklah dalam artian statis, karena kebudayaan pada galibnya adalah sebuah produk sementara yang masih selalu berproses. Sebagaimana dikatakan oleh Samuel (1991: 23), "the elements of culture are subject to continuous social reconstruction." Masyarakat Bali sadar bahwa mereka harus mengadaptasi diri dengan dunia yang tengah berubah, sementara pada saat yang sama mereka juga sadar untuk menjaga kontinuitas budaya dan identitasnya. Inilah yang sering disebut sebagai *continuity in changes*, atau *dynamic equilibrium*.¹¹ Dengan cara ini, masyarakat Bali secara terus-menerus mengukir dan mengukir kembali identitasnya, sementara benang merah kelakuan tidak diputus. Proses internasionalisasi, terutama yang terjadi melalui aktivitas kepariwisataan, secara bersamaan diikuti oleh proses yang arahnya berlawanan, yaitu suatu proses ke dalam, mencari identitas ke masa lalu, yang bisa disebut sebagai proses 'tradisionalisasi' atau indigenisasi, atau 'balinisasi' orang Bali sendiri.

Hal ini sejalan juga dengan pendapat Clifford Geertz (1999), yang mengedepankan bahwa pelestarian tidak boleh diartikan sebagai usaha 'membekukan' sebuah kebudayaan, karena kebudayaan memang selalu berubah, direkonstruksi dan direkreasi, sebagai respon terhadap situasi yang berubah. Usaha untuk membekukan kebudayaan atas nama demi keaslian atau otentisitas, justru akan menghasilkan dekadensi. Geertz (1999: 19) menulis bahwa kebudayaan dan tinggalkan budaya:

... is not some solid, unmoving block of objects, practices, beliefs, and understanding, a settled, crystalline structure of traditions and customs that time and tourism, development and modernity, can only erode, disrupt, pollute, or destroy. It is something that is constantly changing, constantly being reconstructed and recreated, in response to new circumstances and emerging needs. The so-called "museum" or "culture park" view of heritage as something that has only to be preserved and tended, only to be kept pristine, isolated from alterations going on around it, is not only utopian, it is mischievous. In trying to freeze a living tradition in the name of authenticity you produce the worst sort of inauthenticity—decadency, not purity.

Masyarakat Bali dalam banyak hal telah menemukan kembali berbagai tradisinya yang (konon) pernah ada, suatu proses yang oleh Hobsbawm (1983) disebut sebagai '*reinvention of tradition*'. Tradisi-tradisi baru dimunculkan, dengan legitimasi tradisi lama, atau ajaran susastra agama, yang sesungguhnya adalah adaptasi, reinterpretasi, dan rekontekstualisasi terhadap situasi yang sedang berkembang.¹² *Invented tradition*¹³ ini adalah salah satu hasil

¹¹ Mengenai transformasi budaya Bali dari zaman ke zaman, tetapi tetap pada pilar identitas 'budaya Bali', lihat misalnya uraian Geriya (2000).

¹² Bandingkan misalnya dengan Jonathan Friedman (1993: 739), yang menyebutkan bahwa "the fourth world (yaitu masyarakat indigenous) seeks identity in its own past or cultural specificity. ... new traditions emerged as 'transformation' and adaptations to new conditions of existence".

¹³ Istilah *reinvention of tradition* dipopulerkan oleh Eric Hobsbawm (1983: 1). *Invented tradition* adalah "a set of practices, normally governed by overtly and tacitly accepted rules and a set of a ritual or symbolic nature, which seeks to inculcate certain values and norms of behaviour by repetition, which automatically implies continuity with the past" (1983: 1). *Inventing tradition* "is essentially a process of formalization and

dari dialog antara orientasi ke luar (internasionalisasi) dengan orientasi ke dalam (tradisionalisasi-indigenisasi). Tradisi atau elemen budaya baru yang ditumbuhkembangkan, bukan saja untuk kepentingan pariwisata, tetapi (bahkan lebih sering) adalah untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya sendiri.

Dengan berbagai argumentasi di atas, ungkapan bahwa 'Bali tidak lagi Bali' atau 'Bali sudah kehilangan kebalikannya', tidak mendapatkan *pijakan* akademis yang kuat. Mengutip Clifford Geertz dalam kaitan ini,

The answer to that most famous tourist question, "Is Bali still Bali?" is: "Of course it is! What else could it be?" (1999: 19).

WACANA PENUTUP

Apa yang diuraikan di atas, mengandung muatan teoretis-akademis yang sangat significant. Bali, dengan keunikannya, adalah suatu 'masyarakat modern yang tradisional'. Bali telah mampu menjadi laboratorium sosial-budaya, untuk menguji kesahihan atau kelemahan berbagai teori Barat. Temuan-temuan dari Bali memang ternyata sudah mampu memaksa terjadinya revisi terhadap teori Barat. Teori Modernisasi Klasik, yang mendikotomikan modernitas dengan tradisionalitas, dan menihilkan peranan nilai tradisional dalam pembangunan, mendapatkan bantahan empiris dari Bali. Teori *hydraulic-despotism* dari Wittfogel, juga harus direvisi, kalau dikaitkan dengan temuan-temuan tentang eksistensi subak di Bali. Demikian juga halnya, berbagai teori yang mendikotomikan pariwisata dengan kebudayaan lokal, berbagai pandangan modernistis yang menghipotesiskan hancurnya kebudayaan lokal karena pengaruh pariwisata, juga mendapat bantahan dari Bali. Kasus Bali menunjukkan bahwa meskipun gejala perubahan sosial-budaya terjadi, tetapi pariwisata lebih berperan sebagai wahana pelestari kebudayaan dalam arti yang luas.

Pariwisata sudah menjadi nafas dan urat nadi pembangunan Bali, bukan saja dalam aspek ekonomi, melainkan juga dalam berbagai aspek lainnya. Uraian di depan juga secara jelas telah menunjukkan bahwa pesimisme tentang kehancuran kebudayaan Bali akibat pariwisata tidak terbukti. Bahkan sebaliknya, dengan berbagai mekanisme, langsung ataupun tidak langsung, pariwisata telah mampu menjadi patron baru bagi kebudayaan. Pariwisata telah menjadi trigger dari dinamika masyarakat dalam pembangunan.

Walaupun berbagai kekhawatiran telah dikemukakan mengenai pengaruh pariwisata terhadap kebudayaan Bali, tetapi data lapangan menunjukkan bahwa pariwisata telah mampu menjadi dinamisor kebudayaan Bali dalam berbagai aspeknya, dan menjadi patron baru dalam merangsang berkembangnya kreativitas. Pariwisata telah mampu menjadi wahana pelestarian kebudayaan Bali –dalam arti yang dinamis. Dalam konteks ini, hubungan antara pariwisata dengan kebudayaan lebih bersifat simbiosis mutualisme daripada parasitisme. Dengan demikian, pandangan dikotomis yang melihat pariwisata sebagai 'musuh' kebudayaan semestinya dapat digantikan dengan pandangan sinergis, bahwa pelestarian kebudayaan bisa berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata, bahkan pariwisata bisa menjadi wahana yang sangat baik dalam pelestarian kebudayaan tersebut.

Sejalan dengan simpulan di atas, maka pertanyaan yang lebih arif bukanlah 'bagaimana menghindarkan sentuhan pariwisata terhadap kebudayaan', melainkan 'bagaimana pariwisata semestinya dikelola agar bermanfaat bagi masyarakat dan kebudayaan'.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, M dan N. Parining. 1999. "Keterkaitan antara Pariwisata dengan Pertanian di Bali: Tinjauan dengan Model Social Accounting Matrix." Paper disampaikan dalam Seminar *Pariwisata Berkelanjutan menurut Perspektif Orang Bali*. Puslit Kebudayaan dan Pariwisata Unud, Denpasar, 3 Agustus 1999.
- Bagus, I. G. 1975. "Sanur dan Kuta: Masalah Perubahan Sosial di Daerah Pariwisata." Dalam I. G. Bagus (ed). *Bali dalam Sentuhan Pariwisata*. Denpasar, Fakultas Sastra Unud. h 95-109.
- Cohen, Erik. 1984. "The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings". *Annal of Tourism Research*. No. 30: 236-66.
- Eickelman, Dale F., and James Piscatori. 1990. *Social Theory in the Study of Muslim Societies*. Dalam: Dale F. Eickelman and James Piscatori (eds.), *Muslim Travellers: Pilgrimage, Migration, and the Religious Imagination*. London: Routledge
- Erawan, Nyoman. 1993. *Pariwisata dan Pembangunan, Bali sebagai suatu Kasus*. Denpasar: Upada Sastra.
- Erawan, Nyoman. 1999. "Konsep Pembangunan Pariwisata Bali: Aspek Manfaat Ekonomi." Paper disampaikan dalam Seminar *Pariwisata Berkelanjutan menurut Perspektif Orang Bali*. Puslit Kebudayaan dan Pariwisata Unud, Denpasar, 3 Agustus 1999.
- Friedman, J. 1993. "Will the Real Hawaiian Please Stand: Anthropologists and Natives in Global Struggle for Identity." *BKI* 149:737-767.
- Geertz, Clifford. 1997. "Cultural tourism: tradition, identity and heritage construction." Dalam Wiendu Nuryanti (ed), *Tourism and Heritage Management*. Yogyakarta: UGM Press. H. 14-24.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Hobsbawm, E. J. and T. O. Ranger, Editors. 1983. *The Invention of Tradition*. New York: Cambridge University Press.
- Lanfant at al. 1995 (eds). *International Tourism: Identity and Change*. International Sociology, London, New Delhi.
- Lansing, S. J. 1974. *Evil in the Morning of the World*. Ann Arbor: Michigan Papers on South and Southeast Asia, No. 6.
- Lea, J. 1995. *Tourism and Development in the Third World*. London and New York: Routledge.
- McKean, Philip Frick. 1978. "Towards a Theoretical Analysis of Tourism: Economic Dualism and Cultural Involution in Bali". Dalam Valena L. Smith (ed). *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. pp. 119-38.
- Naya Sujana, N. 1994. "Manusia Bali di Persimpangan Jalan." Dalam G. Pitana (ed), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post: 45-72.

- Noronha, R. 1979. "Paradise Revisited." Dalam E. de Kadt (ed), *Tourism, Passport to Development?* Oxford, Oxford University Press: 177-204.
- Picard, M. 1996. *Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapore: Archipelago Press.
- Pitana, I Gde (ed). 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Post.
- Pitana, I Gde. 1998. *Interaction Between The Arts and Tourism*. Dalam Sudyatmaka Sugriwa (ed), *Taksu: Never Ending Art Creativity*. Denpasar: Cultural Affairs Office of Bali Province and Taksu Foundation.
- Pitana, I Gde. 1999. *Pelangi Pariwisata Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Post.
- Pitana, I Gde, dkk. 2000. *Kuta, Cermin Retak Pariwisata Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Post.
- Santosa, S.P. 2001. Bahan paparan untuk Gubernur Bali. Mimeo.
- UNEP (United Nations Environment Programme). 2002. *Industry as Partner for Sustainable Development: Tourism*. UK: UNEP.
- Unud and G. Francillon. 1975. "Tourism in Bali --Its Economics and Socio-cultural Impact: Three Points of View." *International Social Science Journal* XXVII (4): 721-52.
- Urry, J. 1995. "The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies". London: Newbury Park.
- Wahab, Salah. 1997. "Balancing culture heritage conservation and sustainable development through tourism." Dalam Wiendu Nuryanti (ed), *Tourism and Heritage Management*. Yogyakarta: UGM Press. H. 59-74.
- Wood, R. E. 1980. "International Tourism and Cultural Change in Southeast Asia." *Economic Development and Cultural Change* 28 (1).